

PENGARUH STATUS KEPEMILIKAN LAHAN TERHADAP PENDAPATAN PETANI BERLAHAN SEMPIT DI KABUPATEN INDRAMAYU DAN PURWAKARTA

Morina Pasaribu dan Istriningsih

Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian
Jl. Salak 22, Bogor, Jawa Barat, Indonesia
E-mail: psrbmorina@gmail.com

ABSTRACT

The Impacts of Land Ownership Status on Small Scale Farmers' Income in Indramayu and Purwakarta Districts. The conversion of agricultural land in West Java in 2012-2015 amounted to 1.24% has caused a decrease in the number of farmer households, a decrease in the area of land under cultivation and a change of land tenure status. These changes have impacted on the farmers' income. The government program, namely the Special Efforts of Soybean Corn Rice (Upsus Pajale) was expected to increase production yields which will impact the increased farmers' income. Most of the farmers who received aids of Upsus Pajale were groups of small scale farmers. This study aimed to analyze the impact of land ownership status, land area and production on the income of small scale farmers in Indramayu and Purwakarta Districts. The data collection method used a questionnaire with a total of 50 respondents in Indramayu and Purwakarta, West Java using purposive sampling. Data were analyzed quantitatively through income analysis, respondent distribution and linear regression. The results showed that the land ownership status (ownership, rent, and profit sharing) was proven to significantly affect the income of smallholder farmers in Indramayu and Purwakarta, West Java. Farmers with rental status have a lower income than farmers with owned status. This condition was caused by the additional obligation for rental farmers in the form of rent or profit sharing. Farmers showed a positive response to solutions to improve the welfare of small scale farmers through the government program UPSUS Pajale. However, farmer respondents considered this discourse less appropriate due to the reasons for fear of losing their land and jobs. The government needs to design policies and programs that are more directed at optimizing technology and knowledge-based production and strengthening land tenure in order to improve the welfare of farmers.

Keywords: *land conversion, income, land status, land consolidation*

ABSTRAK

Konversi lahan pertanian Jawa Barat pada tahun 2012-2015 sebesar 1,24% menyebabkan menurunnya jumlah Rumah Tangga Petani (RTP), menurunnya luasan lahan garapan RTP, serta perubahan status penguasaan lahan. Perubahan tersebut dapat berpengaruh pada tingkat pendapatan petani. Program pemerintah Upaya Khusus Padi Jagung Kedelai (Upsus Pajale) diharapkan dapat meningkatkan hasil produksi serta pendapatan RTP. Sebagian di antara petani penerima bantuan Upsus Pajale merupakan kelompok petani dengan penguasaan lahan relatif sempit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh status kepemilikan lahan, luas lahan, dan produksi terhadap pendapatan petani berlahan sempit di Kabupaten Indramayu dan Purwakarta. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan total responden 50 orang di Kabupaten Indramayu dan Purwakarta, Jawa Barat, secara *purposive sampling*. Data dianalisis secara kuantitatif melalui analisis pendapatan, distribusi responden, dan regresi linier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status kepemilikan lahan (milik, sewa, dan bagi hasil) terbukti secara nyata mempengaruhi pendapatan petani berlahan sempit di Kabupaten Indramayu dan Purwakarta, Jawa Barat. Petani dengan status sewa memiliki tingkat pendapatan yang lebih kecil dari petani milik. Kondisi tersebut disebabkan adanya kewajiban tambahan bagi petani sewa berupa biaya sewa ataupun bagi hasil. Petani menunjukkan respon positif terhadap solusi peningkatan kesejahteraan petani skala kecil melalui program pemerintah UPSUS Pajale.

Wacana konsolidasi lahan belum mendapatkan respon positif bagi petani karena ketakutan kehilangan tanah dan pekerjaan. Pemerintah perlu merancang kebijakan dan program yang lebih mengarah pada optimalisasi produksi berbasis teknologi dan pengetahuan serta dan penguatan status kepemilikan lahan guna meningkatkan kesejahteraan petani.

Kata kunci: *konversi lahan, pendapatan, status lahan, konsolidasi lahan*

PENDAHULUAN

Tolok ukur pencapaian swasembada pangan adalah peningkatan produksi tanaman pangan secara berkelanjutan. Pencapaian swasembada pangan diarahkan dengan optimalisasi produktivitas hasil pertanian yang nantinya berujung pada peningkatan pendapatan petani. Pertumbuhan produktivitas hasil pertanian antara lain dipengaruhi oleh pertambahan luas areal panen dan peningkatan produktivitas (Sumaryanto *et al.*, 2005). Pada tanaman padi, lahan beserta kualitas bibit, pupuk N, pupuk P, dan tenaga kerja mempengaruhi efisiensi usaha tani secara signifikan, selain faktor umur, pendidikan, musim, kelompok tani, dan status kepemilikan lahan (Kusnadi *et al.*, 2016).

Implementasi upaya pencapaian swasembada pangan masih mengalami beberapa permasalahan di lapangan. Permentan No. 03/2015 menjadi awal pelaksanaan peningkatan produktivitas pangan dalam bentuk program upaya khusus padi, jagung, dan kedelai (Upsus Pajale). Dasar pelaksanaannya karena teridentifikasinya beberapa permasalahan yakni: (a) berkurangnya lahan pertanian akibat alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian, (b) rusaknya infrastruktur/jaringan irigasi, (c) semakin berkurang dan mahalnya upah tenaga kerja pertanian, (d) masih tingginya susut hasil (*losses*), (e) belum terpenuhinya kebutuhan pupuk dan benih sesuai rekomendasi dan spesifik lokasi, (f) lemahnya permodalan petani, dan (g) fluktuasi harga pada saat panen raya (Balitbangtan, 2016).

Salah satu tantangan terbesar dalam pencapaian swasembada pangan adalah

berkurangnya lahan pertanian akibat alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian. Menurut Sumaryanto *et al.* (2005), fakta di lapangan menunjukkan terjadinya stagnansi dalam peningkatan produktivitas akibat konversi lahan subur khususnya persawahan irigasi maupun tadah hujan. Kondisi pemanfaatan lahan pertanian Nasional, dalam kurun waktu 2012-2015 terjadi penurunan sebesar 0,23% (BPS 2016). Secara khusus, Provinsi Jawa Barat juga menunjukkan kondisi yang sama dimana pemanfaatan luas lahan sawah menurun hingga 1,24% (Pusdatin, 2017).

Konversi lahan pertanian pangan dalam bentuk alih penggunaan lahan untuk komoditas spesifik dan strategis yang dapat diekspor, seringkali dianggap sebagai optimalisasi pemanfaatan lahan, namun suatu saat akan berdampak buruk pada ketahanan pangan (Popescu *et al.*, 2017). Dampak lainnya tidak hanya berpengaruh terhadap kapasitas produksi pangan tapi dapat meluas dari segi sosial, ekonomi, dan budaya (Irawan and Friyatni, 2002). Proses pemulihan lahan pertanian membutuhkan waktu yang cukup lama mengingat bahwa konversi lahan sawah bersifat *irreversible* atau sulit untuk kembali ke pemanfaatan sebelumnya (Irawan, 2005). Arah kebijakan pemerintah harus dapat berfokus pada keberadaan dan fungsi penting lahan, khususnya lahan pertanian (Suhardono, 2012).

Konversi lahan pertanian memiliki dampak langsung terhadap petani yakni penurunan luas kepemilikan lahan serta penurunan luas lahan garapan (Ruswandi *et al.*, 2007). Penurunan luas kepemilikan lahan juga disebabkan fragmentasi lahan sebagai dampak dari sistem bagi waris (Darwis, 2008). Hal tersebut sebagaimana

tercermin dari fakta di lapangan bahwa pertanian di Indonesia didominasi oleh petani gurem atau petani berlahan sempit (Sumarno, 2013). Berdasarkan data BPS (2013), jumlah petani yang memiliki lahan sempit (di bawah 0,5 ha) per Rumah Tangga Petani (RTP) nasional mencapai angka 75% dari 305.8612 RTP. Salah satu provinsi penyumbang angka penurunan RTP nasional tersebut terjadi di Jawa Barat hingga 3,42%.

Peningkatan laju konversi lahan juga terjadi pada kabupaten-kabupaten di Jawa Barat. Berdasarkan data BPS (2016), lahan pertanian terluas di Jawa Barat tahun 2015 adalah Kabupaten Indramayu (12,83%). Purwakarta memiliki luas lahan sawah sebesar 2,14% dari total luas lahan sawah Jawa barat 912.794 ha. Penurunan penggunaan lahan pada rentang tahun 2012-2015 mencapai 2,7% di Kabupaten Indramayu dan 10% di Purwakarta. RTP antara tahun 2003-2013 juga mengalami penurunan yang signifikan pada dua kabupaten tersebut yakni 38,58% di Indramayu dan 29,51% di Purwakarta (BPS, 2013).

Permasalahan konversi lahan juga dibarengi dengan persoalan status kepemilikan maupun penguasaan lahan. Perubahan terhadap hak penguasaan atas sebidang lahan turut berpengaruh terhadap ekonomi keluarga petani. Hak untuk menguasai lahan dimaksud dapat berubah, yakni dapat hilang atau muncul, karena transaksi jual beli, pembagian warisan, hibah, maupun transaksi yang lainnya seperti bagi hasil, sewa, gadai, atau numpang (Winarso, 2012). Guna memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangganya, maka petani yang tidak memiliki lahan sendiri memiliki peluang untuk menguasai lahan pertanian yang sifatnya sementara melalui sistem sewa atau bagi hasil. Perbedaan status penguasaan lahan ternyata akan berpengaruh terhadap perbedaan pendapatan yang dihasilkan (Manatar *et al.*, 2017). Menurut Susilowati (2015), RTP cenderung akan mengelola lahan miliknya sendiri untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal. Pernyataan ini diperkuat oleh Rondhi dan Adi (2018) yang menyebutkan

bahwa usahatani pada lahan milik sendiri memiliki efisiensi biaya usahatani paling tinggi dibandingkan pola bagi hasil dan sewa. Hasil penelitian terhadap usahatani padi di Minahasa Selatan oleh Manatar *et al.* (2017) menunjukkan bahwa justru pendapatan petani penyewa lebih tinggi dan berbeda nyata terhadap pendapatan yang diperoleh petani pemilik, karena petani penyewa selain menanggung biaya sewa lahan juga menanggung resiko kerugian, sehingga petani penyewa akan berusaha keras untuk meningkatkan produktivitas usahatannya.

Implementasi Upaya Khusus Padi Jagung Kedelai (upsus pajale) diharapkan dapat berdampak terhadap peningkatan hasil produksi pertanian serta berimbas terhadap peningkatan pendapatan RTP. Sebagian di antara petani penerima bantuan upsus pajale tersebut merupakan kelompok petani dengan penguasaan lahan relatif sempit. Mengingat relatif sempitnya lahan yang dikuasai petani, maka bagaimana pengaruh status kepemilikan lahan terhadap pendapatan petani berlahan sempit sebagai penerima bantuan program upsus pajale tersebut perlu dikaji lebih lanjut.

Penelitian sebelumnya mengenai hubungan luas penguasaan lahan sawah yang relatif sempit dengan pendapatan petani dari usahatannya di Kabupaten Kampar, menggunakan analisis regresi dengan tiga variabel independen yakni luas lahan, tenaga kerja dan biaya produksi untuk menduga pengaruhnya terhadap pendapatan petani (Zargustin *et al.*, 2015). Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh status kepemilikan lahan terhadap pendapatan petani berlahan sempit di Kabupaten Indramayu dan Purwakarta, Jawa Barat. Wacana kebijakan konsolidasi lahan juga menjadi bagian dari penelitian guna melihat respon petani terhadap arah kebijakan pembangunan pertanian. Makalah ini bertujuan untuk membahas permasalahan status kepemilikan lahan dan pendapatan petani berlahan sempit di Kabupaten Indramayu dan Purwakarta serta solusi kedepannya.

METODOLOGI

Lokasi Penelitian dan Sumber Data

Penelitian dilaksanakan pada Bulan September 2015 di Kabupaten Indramayu dan Purwakarta, Jawa Barat. Prosedur penentuan lokasi dan responden ditentukan dengan sengaja (*purposive*) yakni di sentra produksi sawah dan petani padi sawah berlahan sempit penerima paket program upsus pajale berupa sarana produksi dan alat mesin pertanian.

Pengumpulan data primer melalui kuesioner dengan 63 pertanyaan berisi informasi profil petani, program pemerintah yang didapatkan, analisis usaha tani, dan kelembagaan serta pengelolaan usahatannya di masa mendatang. Total jumlah responden 50 orang yang berasal dari Kecamatan Pesawahan dan Kiarapedes di Kabupaten Purwakarta; dan Kecamatan Karangampel di Kabupaten Indramayu. Data dukung lain diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2012-2015 yang berkaitan penggunaan lahan dan posisi perkembangan RTP secara nasional, Jawa Barat, Kabupaten Indramayu dan Purwakarta.

Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kuantitatif. Analisis kuantitatif merupakan alat untuk mengukur kondisi yang terjadi di lapangan pola sebab-akibat dari variabel-variabel yang ditetapkan (Somantri, 2005). Fokus penelitian dijabarkan dengan cara berpikir induktif yakni dari umum lalu berakhir kepada tujuan penelitian (Izhar, 2016) dengan melihat sejarah penguasaan lahan, respon petani terhadap ragam bantuan program upsus pajale, respon terhadap wacana konsolidasi lahan, mengukur pendapatan petani, serta melihat faktor yang mempengaruhi pendapatan tersebut seperti luas lahan, status kepemilikan, dan produksi.

Pengolahan data dilakukan dengan analisis usaha tani untuk mendapatkan nilai pendapatan

petani. Variabel pendapatan sebagai variabel dependen bersama variabel independen yang terdiri atas luas lahan, produksi, dan status kepemilikan lahan, diolah secara regresi linear melalui aplikasi minitab. Tujuan regresi untuk melihat pengaruh luas lahan, produksi, dan status lahan kepemilikan, terhadap tingkat pendapatan petani, khususnya berdasarkan status kepemilikan lahan sewa dan milik dengan persamaan:

$$Y = b_0 + b_1LL + b_2PL + b_3SP$$

Keterangan:

Y = pendapatan (Rp)

b_0 = konstanta

b_1 - b_3 = koefisien regresi

LL = luas lahan (ha)

PL = produksi lahan

SP = dummy status kepemilikan lahan petani

Pengaruh variabel diuji melalui Uji t dan Uji F. Uji t parsial untuk mengetahui apakah variabel independen mempunyai pengaruh secara parsial terhadap variabel dependen. Jika nilai *p value* dari t parsial < 0,05 maka variabel individu tersebut berpengaruh terhadap Y. Uji F berguna untuk menentukan apakah secara serentak semua variabel independen memengaruhi variabel dependen. Apabila nilai *P value* Uji F bernilai < 0,05, maka secara simultan variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen (Janie, 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Konsep perencanaan pembangunan suatu wilayah harus mampu mengoptimalkan potensi perekonomian dan sumber daya alam. Optimalisasi potensi tersebut nantinya dapat digunakan untuk menyesuaikan kebutuhan termasuk infrastruktur pertanian. Gambaran umum lokasi penelitian tentang potensi luas wilayah, topografi, hidrologi, iklim, dan

Tabel 1. Gambaran umum Kabupaten Indramayu dan Purwakarta

Uraian	Kabupaten Indramayu	Kabupaten Purwakarta
Luas Wilayah (km ²)	2.000,99	971,72
Topografi (mdpl)	0-100	25 – 500
Hidrologi	DAS Cimanuk dan DAS Cipunagara	DAS Citarum dan DAS Cilamaya
Iklm:		
Suhu udara	22,9°-30° C	22°-28°C
Curah hujan	1.587 mm/tahun	3.093 mm/tahun
Penggunaan lahan (ha):		
Sawah irigasi	108.020	10.532
Sawah tadah hujan	10.191	7.091

Sumber: BPS Kabupaten Indramayu dan Purwakarta dalam angka (2013)

penggunaan lahan sebagai lahan pertanian dapat dilihat pada Tabel 1.

Luasan wilayah untuk Kabupaten Indramayu 5,63% dan Purwakarta 2,66% dari luasan wilayah Provinsi Jawa Barat. Pemanfaatan lahan didominasi sebagai lahan sawah. Tercatat lahan sawah Kabupaten Indramayu 118.211 Ha atau sekitar 56% dari luasan wilayah, sedangkan penggunaan tanah sebagai lahan sawah Kabupaten Purwakarta 17.623 Ha atau sekitar 17,8% dari luasan wilayah.

Topografi Kabupaten Indramayu sebagian besar merupakan dataran atau daerah landai yang cukup berpengaruh terhadap drainase, sedangkan Kabupaten Purwakarta memiliki topografi bervariasi, dari dataran rendah ke dataran tinggi di bagian tenggara. Kedua kabupaten didukung oleh Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dalam pertanian padi sawah sangat berperan penting.

Karakteristik Responden di Lokasi Penelitian

Karakteristik responden dijabarkan berdasarkan umur, lama berusahatani, konsentrasi mata pencaharian sebagai petani, dan luas penguasaan lahan. Karakteristik tersebut akan

diklasifikasikan untuk melihat distribusi atau persentase posisi responden (Tabel 2).

Data responden pada dua kabupaten lokasi penelitian berdasarkan karakteristik umur, lama berusahatani, konsentrasi tenaga kerja, dan luas penguasaan lahan menunjukkan kondisi cukup homogen. Karakteristik umur responden tertinggi pada lokasi penelitian berada pada umur 46-65 tahun dengan distribusi 70% responden. Sebaran responden berdasarkan lama berusaha tani cukup beragam dengan distribusi terbesar pada rentang 32-47 tahun yakni 36% responden. Hampir semua responden dengan angka distribusi 92% menjadikan pertanian sebagai pekerjaan pokok. Luas penguasaan lahan pertanian responden lebih banyak berlahan sempit dengan kategori luasan lahan di bawah 0,5 ha yakni 90% dari keseluruhan responden.

Karakteristik umur dan lama berusahatani merupakan gambaran semakin berkurangnya pemuda yang berkeinginan untuk meneruskan atau menjadikan pertanian sebagai mata pencaharian. Akibatnya terjadi fenomena *aging farmer*. Hasil olahan data Susilowati (2014) yang menggunakan BPS tahun 2003-2013, menunjukkan partisipasi petani pada tahun 2013 didominasi umur 35-54 tahun yakni 62%, diikuti kisaran umur >55 tahun sebesar 27%. Partisipasi kategori umur di bawah 35 tahun hanya 11 %. Apabila dibandingkan pada tahun 2003 dengan 2013, terjadi penurunan drastis dari 26% menjadi 11 %. Menurut Susilowati (2016), kondisi tersebut akan memberikan konsekuensi terhadap pembangunan sektor pertanian berkelanjutan utamanya produktivitas hasil pertanian. Minat tenaga kerja muda di sektor pertanian dianggap kurang bergengsi, berisiko tinggi, tidak adanya jaminan pendapatan yang tetap, apalagi rata-rata penguasaan lahan semakin sempit.

Dinamika Status Kepemilikan Lahan

Status kepemilikan lahan di lokasi penelitian diklasifikasikan berdasarkan periode awal bertani, masa saat responden memiliki luasan tertinggi, dan penguasaan lahan saat ini. Penguasaan lahan diklasifikasikan dalam 3

Tabel 2. Karakteristik responden Kabupaten Indramayu dan Purwakarta tahun 2015

Indikator	Kriteria	Kab. Indramayu		Kab. Purwakarta		Total (%)
		Orang	(%)	Oang	(%)	
Umur (tahun)	25-45	8	32	7	28	30
	46-65	17	68	18	72	70
Lama berusahatani (tahun)	1 – 15	7	28	8	32	30
	15 – 31	9	36	8	32	34
	32 – 47	9	36	9	36	36
Konsentrasi tenaga (orang)	Pekerjaan Pokok	24	96	22	88	92
	Pekerjaan Sampingan	1	4	3	12	8
Luas penguasaan lahan saat ini (ha)	0,1 – 0,4	23	92	22	88	90
	0,5 – 0,9	2	8	3	12	10

Sumber: data primer, 2015 (diolah)

macam, yaitu: (1) lahan milik; (2) lahan sewa/ bagi hasil; (3) lahan milik dan lahan sewa/ bagi hasil (Tabel 3).

Status penguasaan lahan tidak hanya berupa lahan milik, namun juga lahan sewa/ bagi hasil. Distribusi responden di awal periode bertani responden di Kabupaten Indramayu lebih banyak pada lahan sewa/bagi, sedangkan lahan responden Kabupaten Purwakarta lebih banyak berstatus milik sendiri. Dalam perjalanan masa bertani, petani responden cenderung untuk meningkatkan penguasaan lahan, baik berstatus milik dan atau sewa. Namun dalam perkembangannya, keinginan responden untuk meningkatkan luas kepemilikan lahan pada

akhirnya terbatas adanya konversi lahan yang terlihat dari penurunan pemanfaatan lahan pertanian dalam uraian data BPS (2016). Petani adalah pemimpin atas usahatannya, untuk meningkatkan perekonomiannya diperlukan upaya memperluas lahan garapan (Mudakir, 2011).

Penguasaan lahan sebagai milik memberikan keuntungan, keamanan, dan kenyamanan bagi petani karena tidak adanya biaya yang dikeluarkan. Tinggi rendahnya kepemilikan lahan dan luasan garapan disebabkan oleh faktor sosial ekonomi, dinamika pertumbuhan perkotaan dan demografi, serta regulasi (Ridwan, 2009).

Tabel 3. Perubahan status kepemilikan lahan Kabupaten Indramayudan Purwakarta

Periode	Penguasaan Lahan	Kabupaten Indramayu		Kabupaten Purwakarta	
		Rerata Luasan (Ha)	Distribusi Responden (Orang)	Rerata Luasan (Ha)	Distribusi Responden (Orang)
Awal bertani 1986-1982	Lahan Milik	0,22	7	0,27	20
	Lahan Sewa/Bagi Hasil	0,39	10	0,32	3
	Lahan Milik + Sewa/Bagi Hasil	1,10	8	0,8	2
Masa kepemilikan lahan tertinggi, 1983-1998	Lahan Milik	0,38	10	0,23	13
	Lahan Sewa/Bagi Hasil	0,54	15	0,28	2
	Lahan Milik + Sewa/Bagi Hasil	-	-	1,00	10
Saat sekarang 1999-2015	Lahan Milik	0,29	10	0,29	15
	Lahan Sewa/Bagi Hasil	0,33	13	0,23	4
	Lahan Milik + Sewa/Bagi Hasil	0,34	2	0,44	6

Sumber: data primer, 2015 (diolah)

Jumlah luasan dan distribusi responden dengan masing-masing status penguasaan lahan menunjukkan terjadinya penurunan penguasaan lahan pada masing-masing kabupaten. Hal tersebut disebabkan adanya proses pembagian harta warisan (fragmentasi lahan), konversi lahan akibat pembangunan pemukiman, dan penjualan kepada pihak lain. Ada beberapa alasan dikemukakan oleh Ilham *et al.* (2005) bahwa harga lahan, aktivitas ekonomi suatu wilayah, pengembangan pemukiman, dan daya saing produk pertanian merupakan faktor-faktor ekonomi yang menentukan konversi lahan sawah. Pada akhirnya dinamika penguasaan lahan nasional menunjukkan kecenderungan penurunan status penguasaan lahan pertanian sawah, sehingga terjadi peningkatan jumlah petani tidak berlahan, petani kecil atau gurem dan tanah guntai atau alih pemilikan tanah oleh penduduk pendatang (Rachmat, 2011).

Analisis Usaha Tani Padi Sawah Berdasarkan Status Kepemilikan Lahan

Analisis usaha tani dapat menjadi ukuran tingkat pendapatan petani responden. Nilai pendapatan responden diperoleh berdasarkan pendapatan satu musim tanam dengan variabel penerimaan dikurangi pengeluaran. Hasil analisis kemudian digunakan untuk membandingkan tingkat pendapatan responden berdasarkan status kepemilikan lahan (Tabel 4).

Rata-rata pendapatan petani responden per musim tanaman sebesar Rp. 3.182.053. Berdasarkan status kepemilikan lahan, distribusi responden pada rentang kategori Rp. 229.500-5.262.750 lebih besar dibandingkan pada rentang kategori Rp. 5.262.750-10.296.000. Distribusi petani berstatus milik pada rentang kategori Rp. 5.262.750-10.296.000 lebih banyak.

Berdasarkan penggunaan faktor produksi, petani pemilik dan sewa menggunakan faktor produksi pada skala yang tidak terlalu besar, baik pada biaya tenaga kerja, benih, pupuk, obat-obatan, dan biaya lainnya. Penggunaan faktor produksi benih, pupuk, dan sarana produksi

tersebut akan mengikuti luasan lahan. Luasan lahan tersebut yang nantinya akan menjadi salah satu faktor tinggi rendahnya pendapatan petani. Selain karakteristik petani berupa umur, pendidikan, pengalaman bertani, yang dianggap mempengaruhi tingkat pendapatan petani, beberapa faktor lain juga dianggap dapat mempengaruhi pendapatan petani, yaitu luas lahan seperti penelitian yang dilaksanakan di Kabupaten Deli Sedang (As'ad *et al.*, 2018) dan Minahasa Selatan (Manatar *et al.*, 2017).

Analisis Pengaruh Status Kepemilikan Lahan, Luas Lahan, dan Produksi Padi Sawah

Pembuktian status kepemilikan lahan, luas lahan dan produksi padi sawah sebagai faktor yang dianggap memengaruhi tingkat pendapatan responden akan diuji melalui analisis regresi. Dalam analisis ini, variabel yang dipengaruhi adalah pendapatan responden. Berikut ini adalah hasil regresi dengan aplikasi minitab (Tabel 5).

Koefisien determinasi R^2 (*R square*) sebesar 82,16% menunjukkan bahwa pendapatan cukup baik dijelaskan oleh variabel luas, produksi, dan status kepemilikan lahan, sedangkan 17,84% dipengaruhi oleh variabel bebas lainnya yang belum masuk dalam model. Nilai Uji F hasil regresi menunjukkan *P value* 0,000 dengan $<0,05$, maka secara simultan variabel luas lahan, produksi, dan status kepemilikan lahan berpengaruh terhadap pendapatan. Pada Uji t parsial menunjukkan bahwa *P value* produksi dan status kepemilikan lahan masing-masing sebesar 0,000 dan 0,009 atau $<0,05$, sementara untuk luas lahan sebesar 0,913 $> 0,05$. Hasil persamaan regresi dapat diformulasikan sebagai berikut:

1. Persamaan Dummy 0:

Pendapatan (Y) = -1.358.941 + 132104 luas lahan + 2850 produksi + 835109 dummy status lahan sewa

2. Persamaan dummy 1:

Pendapatan (Y) = -523.832 + 132104 luas lahan + 2850 produksi + 835109 dummy status lahan milik

Tabel 4. Distribusi responden berdasarkan pendapatan dalam satu musim tanam 2015

No	Uraian	Rerata Nilai	Kisaran Nilai	Sewa (Orang)	Milik (Orang)	Lahan Milik + Sewa
A.	Pengeluaran					
1	Biaya Tenaga Kerja (Rp.)	2,172,925	175.000 – 3.080.000 3.080.000 - 5.985.000	13 5	20 4	7 1
2	Biaya Saprodi : Benih (Rp.)	103,920	45.000 - 122.500 125.000 - 200.000	10 8	18 6	8 0
	Pupuk (Rp.)	559,010	75.000 - 725.000 725.000 – 1.375.000	11 7	18 6	8 0
	Obat-obatan (Rp.)	125,410	0 – 230.000 230.000 – 460.000	15 3	20 4	8 0
	Biaya Lainnya (Rp.)	132,186	0 – 500.000 500.000 – 1.000.000	17 1	22 2	8 0
B.	Penerimaan					
1	Produksi GKG (Kg)	1,357	239 – 1.913 1.913 – 3.587	13 5	19 5	8 0
2	Nilai GKG (Rp.)	6,275,504	1.195.000– 8.668.250 8.668.250- 16.141.500	14 4	18 6	7 1
C.	Pendapatan (B-A) (Rp.)	3,182,053	229.500 – 5.262.750 5.262.750 - 10.296.000	14 4	19 5	8 0

Sumber: data primer, 2015 (diolah)

Persamaan hasil regresi tersebut dapat diartikan bahwa jika semua variabel dalam kondisi nol atau tidak ada kegiatan, maka pendapatan petani akan mengalami defisit sebesar Rp. 1.358.941. Apabila kondisi luas lahan dan produksi dalam kondisi tetap, sedangkan status lahan naik satu satuan, maka pendapatan akan meningkat sebesar Rp. 835.109. Hal ini berlaku pada variabel luas lahan atau produksi dengan menganggap variabel lainnya tetap, maka akan terjadi penambahan pendapatan sebesar koefisien masing-masing variabel.

Persamaan dummy 0 dan 1 menunjukkan koefisien pendapatan negatif yang lebih besar pada pada status dummy 0 atau sewa. Petani dengan status sewa akan mengalami tingkat

pendapatan yang lebih kecil dari petani milik, demikian sebaliknya, petani pemilik memiliki nilai pendapatan sebesar 61,45% lebih tinggi dari petani sewa. Hal ini terkait dengan adanya kewajiban tambahan atas penguasaan lahan tersebut berupa biaya sewa ataupun bagi hasil. Kondisi yang sama terjadi pada penelitian di Deli Serdang oleh As'ad *et al.* (2018) bahwa petani penyakap dan penyewa harus membayar sewa kepada pemilik tanah, sehingga pendapatan yang diperoleh lebih rendah dari petani yang memiliki tanahnya sendiri.

Respon Petani Terhadap Program Pemerintah dan Wacana Konsolidasi Lahan sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Petani Lahan Sempit

Tabel 5. Hasil regresi dengan uji F *value* dan uji t parsial responden penelitian

Predictor	Coef	SE Coef	t-Value	P-Value	VIF
Constant	-1358941	453015	-3	0.004	
Luas Lahan	132104	1202418	0.11	0.913	1.28
Produksi Lahan	2850	228	12.52	0.000	1.51
Dummy Status L	835109	307244	2.72	0.009	1.22
Model Summary					
S	964914	R-sq	R-sq(adj)	R-sq(pred)	
		82.16%	81.00%	76.22%	
Source		DF	Adj SS	Adj MS	F-Value
Regression		3	1.97E+14	6.58E+13	70.64
Dummy 0	Y = -1358941 + 132104 luas lahan + 2850 produksi				
Dummy 1	Y = -523832 + 132104 luas lahan + 2850 produksi				

Sumber: data primer, 2015 (diolah)

Luas lahan sawah di Kabupaten Pandeglang adalah 54.768 ha yang tersebar di 35 kecamatan. Pemerintah maupun berbagai penelitian terdahulu terus mengupayakan solusi atau langkah-langkah strategis dalam peningkatan pendapatan petani lahan kecil. Upaya tersebut baik berupa tindak nyata dalam program bantuan/subsidi saprodi hingga pemberdayaan. Namun tidak semuanya mendapatkan respon

positif dari petani. Salah satu tindak nyata pemerintah yang yakni melalui program upus pajale yang dilaksanakan secara nasional pada tahun 2015-2017 (Permentan No. 03 Tahun 2015).

Program pemerintah tersebut mendapatkan respon positif bagi petani berlahan sempit di kedua kabupaten. Meskipun, responden dengan

Tabel 5. Respon petani responden terhadap program pemerintah dan wacana konsolidasi lahan

No	Indikator	Respon Petani	Responden (%)		Alasan
			Sewa	Milik	
1	Perubahan selama setahun terakhir atas program pemerintah	Positif	20	20	1. Motivasi berusahatani 2. Kemudahan memperoleh Pupuk dan Benih 3. Terjaminnya harga gaba 4. Terjaminnya Irigasi
		Negatif	0	10	Belum mendapatkan bantuan secara merata
2	Terpenuhinya kebutuhan keluarga dari hasil usahatani	Positif	5	24	Cukup
		Negatif	15	6	Tidak cukup
3	Keberlanjutan menjadi petani	Positif	19	30	1. Tidak ada pekerjaan lain 2. Fokus pada usaha lain 3. Sudah budaya 4. Jaminan kebutuhan keluarga 5. Lainnya
		Negatif	1	-	Ingin menjual lahan
4	Konsolidasi lahan	Positif	7	11	Asalkan menjadi pengelola
		Negatif	13	24	1. Takut lahan hilang 2. Takut tidak dapat bekerja lagi 3. Lainnya

Sumber: data primer, 2015 (diolah)

status kepemilikan lahan sewa belum sepenuhnya mendapatkan kepuasan secara ekonomi dan pemenuhan kebutuhan keluarga yang sesuai. Namun sebagian besar responden konsisten untuk terus melanjutkan usahatannya.

Penguasaan lahan relatif sempit menyebabkan tidak tercapainya efisiensi teknis dan ekonomis. Hal tersebut menjadi dasar bagi penelitian terdahulu dalam merekomendasikan solusi peningkatan kesejahteraan petani berlahan sempit. Solusi alternatif tersebut mengarah pada kebijakan pemberdayaan kelompok. Salah satunya yakni melalui model *Corporate Farming* yakni konsolidasi lahan dengan penyatuan manajemen usahatani yang dikelola secara bisnis agar terpenuhi skala ekonomi, pernah diujicobakan di beberapa wilayah untuk usahatani padi pada tahun 2000 (Syahyuti *et al.*, 2014).

Ketika wacana konsolidasi lahan (*corporate farming*) atau konsep pengelolaan usaha tani secara bersama disampaikan kepada reponden, diperoleh respon negatif baik petani sewa maupun milik (64-65%) dengan alasan utama ketakutan akan kehilangan lahan dan sumber penghasilan keluarga. Sementara alasan petani yang bersedia terlibat dalam konsolidasi lahan, baik petani berstatus sewa maupun milik (35-36%), jika responden dapat dilibatkan secara langsung sebagai pengelola.

Pada sisi keberlanjutan usahatannya, petani kecil dianggap perlu untuk melakukan konsolidasi antar petani dalam bentuk pemberdayaan kelembagaan beserta pengetahuan yang terbaru (Akhmad, 2007). Namun, petani perlu mendapatkan kepastian terhadap keuntungan yang diperoleh terhadap kebijakan tersebut. Salah satunya dengan keterlibatan langsung petani dalam pengelolaannya. Implementasinya dapat dipertegas dengan menerapkan model konsolidasi lahan yang menganut *corporate farming*, sebuah model yang menggabungkan kekuatan petani, sehingga tercipta keterkaitan subsektor hulu (usaha tani)

dan subsektor hilir yang mencakup pascapanen dan pemasaran (Nuryanti, 2005).

KESIMPULAN

Status kepemilikan lahan (milik, sewa, dan bagi hasil) dan terbukti secara nyata mempengaruhi pendapatan petani berlahan sempit di Kabupaten Indramayu dan Purwakarta, Jawa Barat. Petani dengan status sewa memiliki tingkat pendapatan lebih kecil dari petani milik, demikian sebaliknya, pendapatan petani pemilik lebih tinggi dari petani sewa. Hal ini dapat disebabkan adanya kewajiban tambahan atas penguasaan lahan tersebut berupa biaya sewa ataupun bagi hasil.

Hasil analisis tersebut juga memberikan implikasi terhadap kebijakan yang diambil. Petani menunjukkan respon positif terhadap Program pemerintah upsus pajale. Wacana konsolidasi lahan yang bertujuan untuk memperkuat penguasaan lahan petani masih belum mendapatkan respon positif bagi petani. Oleh karena itu, pemerintah perlu merancang kebijakan dan program yang lebih mengarah pada optimalisasi produksi berbasis teknologi dan pengetahuan serta dan penguatan status kepemilikan lahan guna meningkatkan kesejahteraan petani.

Paket bantuan berbasis teknologi merupakan solusi terbaik untuk meningkatkan produksi, demikian pula keberpihakan program pemerintah dalam penetapan status kepemilikan lahan juga perlu untuk dilakukan. Pembuktian kekuatan pengaruh status kepemilikan lahan terhadap pendapatan, khususnya di Jawa Barat dapat dilakukan melalui kajian yang lebih mendalam dan meluas dalam skala nasional. Beberapa variabel faktor yang mempengaruhi perlu dianalisis kembali, terutama yang berkaitan dengan karakteristik petani dan penggunaan faktor produksi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan penelitian melalui penganggaran DIPA Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian, Balitbangtan.

DAFTAR PUSTAKA

- As'ad, O. A., Salmiah, dan S.F. Ayu. 2018. Analisis pengaruh sistem penguasaan lahan terhadap tingkat produksi dan pendapatan petani padi sawah (Kasus: Desa Tumpatan, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang). *Journal on Social Economic of Agriculture and Agribusiness*, 9(4): 1 – 13.
- Badan Pusat Statistik. 2013. Laporan hasil sensus pertanian 2013. Jawa Barat: BPS Provinsi Jawa Barat.
- Balitbangtan. 2016. Rencana strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 2015-2019.
- Darwis, V. 2008. Keragaan penguasaan lahan sebagai faktor utama penentu pendapatan petani. *In: Prosiding Seminar Nasional Dinamika Pembangunan Pertanian dan Perdesaan: Tantangan dan Peluang Bagi Peningkatan Kesejahteraan Petani Bogor*, 19 November 2008. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Departemen Pertanian.
- Ilham, N., Y. Syaikat, dan S. Friyatni. 2005. Perkembangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi konversi lahan sawah serta dampak ekonominya. *Soca (Socio-Economic of Agriculture and Agribusiness)*, 5(2): 1 – 25.
- Irawan, B. 2005. Konversi lahan sawah : potensi dampak, pola pemanfaatannya, dan faktor determinan. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 23(1): 1 – 18.
- Irawan, B. dan S. Friyatni. 2002. Dampak konversi lahan sawah di Jawa terhadap produksi beras dan kebijakan pengendaliannya. *SOCA (Socio-Economic Of Agriculture and Agribusiness)*, 2(2): 1 – 33.
- Izhar. 2016. Mengidentifikasi cara berpikir deduktif dan induktif dalam teks bacaan melalui pengetahuan konteks dan referensi pragmatik. *Jurnal Pesona*, 2(1): 63 – 73.
- Janie, D.NA. 2012. Statistik deskriptif dan regresi linier berganda dengan SPSS. Edited by Ardiani Ika. Semarang: Semarang University Press.
- Kusnadi, N., N. Tinaprilla, S.H. Susilowati, dan A. Purwoto. 2016. Analisis efisiensi usahatani padi di beberapa sentra produksi padi di Indonesia. *Jurnal Agro Ekonomi*, 29(1): 25 – 48.
- Manatar, M. Prisilia, E.H. Laoh, dan J.R. Mandei. 2017. Pengaruh status penguasaan lahan terhadap pendapatan petani padi di Desa Tumani, Kecamatan Maesaan, Kabupaten Minahasa Selatan. *Agri-Sosio Ekonomi Unsrat*, 13(1): 55 – 64.
- Mudakir, B. 2011. Produktivitas lahan dan distribusi pendapatan berdasarkan status penguasaan lahan pada usahatani padi (kasus di Kabupaten Kendal Propinsi Jawa Tengah). *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 1(1): 74 – 83.
- Nuryanti, S. 2005. Pemberdayaan petani dengan model cooperative farming. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*, 3(2): 152 – 158.
- Permentan No.03 Tahun 2015. 2015. Peraturan Menteri Pertanian No. 03/2015.
- Popescu, H. Gheorghe, I. Nicoale, E. Nica, dan A. Jean. 2017. Land use policy the influence of land-use change paradigm on Romania' s agro-food trade competitiveness-an overview. *Land Use Policy*, 61: 293 – 301.

- Pusdatin. 2017. Statistik lahan pertanian tahun 2012-2016. Jakarta: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian.
- Rachmat, M. dan C. Muslim. 2011. Dinamika penguasaan lahan dan kelembagaan kerja pertanian. Edited by Haryono Soeparno Sahat M. Pasaribu, Handewi P. Saliem dan Faisal Kasryno Effendi Pasandaran. 1st eds. PT Penerbit IPB Press.
- Ridwan, I.R. 2009. Faktor-faktor penyebab dan dampak konversi lahan pertanian. *Jurnal Geografi Gea*, 9(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17509/gea.v9i2.2448>.
- Rondhi, M. dan A.H. Adi. 2018. Pengaruh pola pemilikan lahan terhadap produksi, alokasi tenaga kerja, dan efisiensi usahatani padi. *AGRARIS: Journal of Agribusiness and Rural Development Research*, 4(2): 101 – 10.
- Ruswandi, A., E. Rustiadi, dan K. Mudikdjo. 2007. Dampak konversi lahan pertanian terhadap kesejahteraan petani dan perkembangan wilayah: studi kasus di daerah Bandung Utara. *Jurnal Agro Ekonomi*, 25(2): 207 – 19.
- Somantri, G.R. 2005. Memahami metode kualitatif. *HUBS Asia, Makara, Sosial Humaniora*, 9(2): 57 – 65.
- Suhardono, A. 2012. Optimasi penggunaan lahan pertanian dengan program linier (lokasi studi: J.I. Sumber Buntu, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang). *Jurnal Teknik Pengairan*, 2(1): 55 – 61.
- Sumarno. 2013. Diversifikasi pangan dan transformasi pembangunan pertanian. *In: Evolusi Kemajuan Usaha Pertanian Tanaman Pangan*, edited by dan Effendi Pasandaran Ariani Mewa, Kedi Suradisastra, Nono Sutrisno Saad, Rahmat Hendayana, Haryono Soeparno, 367–94. Jakarta: IAARD Press.
- Sumaryanto, S. Friyatno, dan B. Irawan. 2005. Konversi lahan sawah ke penggunaan non pertanian dan dampak negatifnya. *Prosiding Seminar Nasional Multifungsi Lahan Sawah*, 1–18.
- Susilowati, S.H. 2014. Attracting the young generation to engage in agriculture.” *FFTC-RDA International Seminar on Enhanced Entry of Young Generation into Farming*, October 20-24, 2014, Jeonju, Korea.
- . 2015. Panel petani nasional: mobilisasi sumber daya dan penguatan kelembagaan pertanian (2015).” *In: Penguasaan Lahan Pertanian Pada Berbagai Tipe Agroekosistem*, edited by Hermanto, I Wayan Rusastra, and Bambang Irawan, 1st ed., 41–59. Jakarta: IAARD Press 2015.
- . 2016. Fenomena penuaan petani dan berkurangnya tenaga kerja muda serta implikasinya bagi kebijakan pembangunan pertanian. *Forum Penelitian Agroekonomi*, 34(1): 35 – 55.
- Syahyuti, T. Sutater, Istriningsih, dan S. Wuryaningsih. 2014. 40 Inovasi kelembagaan diseminasi teknologi pertanian: catatan perjalanan 40 tahun Balitbangtan. IAARD Press.
- Winarso, B. 2012. Dinamika pola penguasaan lahan sawah di wilayah pedesaan di Indonesia. *Jurnal Penelitian Pertanian Terapan*, 12(3): 137 – 49.
- Zargustin, D., L. Siswati, dan Mufti. 2015. Strata penguasaan lahan dan pendapatan usahatani padi sawah serta hubungannya dengan alokasi waktu kerja di luar usahatani (kasus: Desa Pulau Birandang, Kecamatan Kampar Timur, Kabupaten Kampar). *Jurnal Agribisnis*, 17(1): 19 –26.